

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung.
- Ariman, H.M. Rasyid dan Fahmi Raghib, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Bawengan, Gerson, 1977, *Penyidikan Perkara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2016, *Tindak Pidana: Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gosita, Arif, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, Chandra M, 2014, *Penjelasan Hukum (Restatement) Bukti Permulaan yang Cukup*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta.
- Harahap Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harjono, 2009, *Mendayagunakan Internet*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

- Haryadi, Dwi, 2012, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, Penerbit Lima, Yogyakarta
- Hiarej, Eddy. O.S, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Kertanegara, Satochid, *Diklat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 156.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang, P.A.F, 1998, *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, sebagaimana dikutip oleh Darwan Prinst, *Hukum Acara dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 1997, *HAM dan Presfektif Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang.
- Nachmias, David dan Chava Nachmias, 1987, *Research Methods in the Social Sciences*, St. Martin's Press, New York.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka, 1994, *Aneka Cara Perbedaan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif)*, Alfabeta, Bandung.
- Suhariyanto, Budi, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Prenada Media Group, Jakarta.

- Suhariyanto, Budi, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Yuhelizar, 2008, *10 Jam Menguasai Internet Teknologi dan Aplikasinya*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Yulia, Rena, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Yurizal, 2018, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia*, Media Nusa Creative, Malang

B. Jurnal:

- Asimah, Dewi Menjawab Kendala Pembuktian dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik, *Puslitbang Hukum dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara*, Vol 3, No 2, Agustus 2020
- Aziz, M Asrul “Pengembangan Satuan Unit Cyber Crime di Tingkat Kewilayahan (Polda dan Polres)”, *Jurnal Litbang Polri*, Vol. 22, No. 1, [doi.org: 10.46976/litbangpolri.v22i1](https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v22i1), Maret 2019
- Christianingrum, Ratna dan Ade Nurul Aida, “Tantangan Penguatan Keamanan Siber dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional”, *Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian –Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, 2021
- Christianto Hwian, “Mekanisme Penegakan Hukum Perkara Pidana Pornografi melalui Internet”, *Veritas et Justitia*, [doi: 10.25123/vej.v3i1.2527](https://doi.org/10.25123/vej.v3i1.2527), Vol. 3, No. 1, 2017
- Darwis, Nurlaly Kriminologi pada Bidang Kebijakan “Cyber Security”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 9, No 2, 2019
- Davis, J. H, *Cybercrimes, National Crime Prevention Council US*, September 2012.
- Manurung, Harol Agosto, *et.al.*, Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) sebagai Kejahatan Transnasional, *Diponegoro Law Journal*, Vol 5, No 3, 2016
- Smith, R. B., “Cybercrime in ASEAN: Anti-Child Pornography Legislation”, *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 5(2), pp. 277-294. [doi: 10.15294/jils.v5i2.37931](https://doi.org/10.15294/jils.v5i2.37931), Vol. 5, No. 2, November 2020.

Pangaribuan, Luhut M.P dan Miko Ginting, Dictum Praperadilan, *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, Vol 11, 2015.

C. Internet:

Abdi, Alfian Saputra, “Pelaku Pornografi Anak yang Cari Korban Via Game Online Ditangkap”, <https://tirto.id/pelaku-pornografi-anak-yang-cari-korban-via-game-online-ditangkap-effM>, diakses 5 Juni 2021

Azhari, Jimmy Ramadhan, “3 Pemuda Ditangkap Buat Grup Berbayar Jual Pornografi Anak”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/08/10/15563631/3-pemuda-ditangkap-buat-grup-berbayar-jual-pornografi-anak-anak>, diakses 5 Juni 2021

Databoks, “Kerugian Akibat Kejahatan Siber Capai Rp 3,88 Triliun, Apa Saja Bentuknya?”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/07/kerugian-akibat-kejahatan-siber-capai-rp-388-triliun-apa-saja-bentuknya>, diakses 14 Februari 2022

Databoks, “KPAI Terima 526 Pengaduan Kasus Pornografi dan Kejahatan Anak di Dunia Maya”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/19/kpai-terima-526-pengaduan-kasus-pornografi-dan-kejahatan-anak-di-dunia-maya>, diakses 7 September 2021

Dinatta, Regi Yanuar Widhia, “Unggah Konten Porno Model di Bawah Umur, Fotografer Diringkus Polda Jatim”, <https://www.ayosurabaya.com/regional/pr-78831012/Unggah-Konten-Porno-Model-di-Bawah-Umur-Fotografer-Diringkus-Polda-Jatim>, diakses 19 April 2022

DW, “Indonesia Menjadi Sasaran Video Pornografi Anak”, <https://www.dw.com/id/indonesia-menjadi-sasaran-video-pornografi-anak/a-42096327>, diakses 14 Februari 2022

DW, “Tahun ini *Facebook* sudah Hapus 5,4 Miliar Akun Palsu”, <https://www.dw.com/id/tahun-ini-facebook-sudah-hapus-54-miliar-akun-palsu/a-51237237>, diakses 28 Februari 2022

Hukum Online, “Apakah Pelapor harus Mempunyai Bukti Tindak Pidana?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-pelapor-harus-punya-bukti-tindak-pidana-lt51d8c5cebaaf6>, diakses pada 19 April 2022

Hukum Online, “Ini Cara Ahli *Cyber Crime* Melacak Admin Akun Anonim Medsos”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-cara-ahli-cyber-crime-melacak-admin-akun-anonim-medsos-lt551b98e8a661f?page=2>, diakses 14 Februari 2022

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), ” Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (1) tentang Kesusilaan”, https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/12/Brief-UU-ITE_27-ayat-1.pdf, diakses 14 Februari 2022

Kominfo, “Pengungkapan Jaringan Internasional Kejahatan Peredaran Materi *Child Online Pornography*”, https://www.kominfo.go.id/content/detail/10676/pengungkapan-jaringan-internasional-kejahatan-peredaran-materi-child-online-pornography/0/berita_satker, diakses 14 Februari 2022

Kumparan, “Dampak Positif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Era Digital”, <https://kumparan.com/berita-update/dampak-positif-perkembangan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-di-era-digital-luvWuBWRpZs>, diakses 19 April 2022

Madrim, Sasmito “Lindungi Korban Kekerasan Seksual, ICJR Dorong Revisi UU ITE”, <https://www.voaindonesia.com/a/icjr-mendorong-revisi-uu-ite-lindungi-korban-kekerasan-seksual/5860158.html>, diakses 14 Februari 2022

Merdeka, “Kominfo Tangani 1 Juta Lebih Konten Pornografi Selama Januari hingga September”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kominfo-tangani-1-juta-lebih-konten-pornografi-selama-januari-hingga-september.html>, diakses 17 November 2021

Mudassir, Rayful "Begini Kronologi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Game Online", <https://kabar24.bisnis.com/read/20190729/16/1130012/begini-kronologi-kejahatan-seksual-terhadap-anak-melalui-game-online>, diakses 11 November 2021

Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Waspada Ancaman Terselubung Kejahatan Seksual bagi Anak di Internet”, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2793/waspada->

[ancaman-terselubung-kejahatan-seksual-bagi-anak-di-internet](#), diakses 11 November 2021

Rizky, Mochamad Januar Rizky, “Kemanan dan Ketahanan Siber Perlu Payung Komprehensif”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/keamanan-dan-ketahanan-siber-perlu-payung-hukum-komprehensif-lt607fcfb349c85/>, diakses 28 Februari 2022

Sari, Haryanti Puspa, “RUU Kemanan dan Ketahanan Siber Dibatalkan , Ini Alasannya”, <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/27/18241611/ruu-keamanan-dan-ketahanan-siber-dibatalkan-ini-alasannya>, diakses 28 Februari 2022

Sofian, Ahmad “Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual *Online* selama Covid-19”, <https://business-law.binus.ac.id/2020/05/29/perlindungan-anak-dari-eksploitasi-seksual-online-selama-covid-19/>, diakses 28 Februari 2022

Widyanuratikah, Inas, “Peluang Anak Jadi Korban Pelecehan di Internet Makin Besar”, <https://www.republika.co.id/berita/qdixyw349/peluang-anak-jadi-korban-pelecehan-di-internet-makin-besar>, diakses 11 November 2021

Wuryasti, Fetry “Masyarakat Perlu Dilibatkan dalam Kurangi Ancaman Kejahatan Siber”, <https://mediaindonesia.com/teknologi/349210/masyarakat-perlu-dilibatkan-dalam-kurangi-ancaman-kejahatan-siber>, diakses 28 Februari 2022

D. Peraturan Perundang-Undangan:

Convention on Cybercrime 2001

Draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Desember 2012

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi/atau Korban Tindak Pidana Pasal 3 dan Pasal 8 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 76).

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5952)

E. Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII /2014 perihal Permohonan
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945, 28 April 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 perihal
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945, 8 Agustus 2011.

F. Hasil Penelitian/Tugas Akhir:

Faizal, Rais, 2019, Kebijakan Penal Tindak Pidana Pornografi Anak melalui Internet, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Suandi, Dara Ade, 2017, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pornografi Anak Melalui Media Internet (Studi Putusan No: 2191/PID.B/2014/PN.SBY), *Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Panggabean, Sosor Agung Suryadi, 2019, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi yang Melibatkan Anak Sebagai Pemeran Film Porno, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

G. Wawancara:

Munadi, Imam, Panit 1 Unit 2 Subdit V Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur, disampaikan dalam hasil wawancara pada tanggal 27 Januari 2022 dan 4 Maret 2022 di Kantor Unit Siber Diterkrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur.

H. Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia